



Special Issue :

Webinar Nasional
HUMANIS 2025

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

Program Pascasarjana Magister Manajemen
Jl. Raya Puspittek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310,
Email : humanismanajemen@gmail.com

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM STRATEGI MANAJEMEN INOVASI KEUANGAN BLUD UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN ANGGARAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL: STUDI KASUS DI RSUD CEMPAKA PUTIH

**Baskoro Pujo Sasmito¹⁾, Raudy Pramudiansyah Putra Daulay²⁾, Rei Adrianto³⁾,
Sahroni⁴⁾**

¹⁻⁴Universitas Pamulang; baskoroujop15@gmail.com; raudyppd150700@gmail.com;
reiadrianto@gmail.com; dosen01420@unpam.ac.id

Abstract. This Study aims to analyze the use of digital technology in financial innovation management strategies at the Regional Public Service Agency (BLUD), especially at Cempaka Putih Hospital, in order to realize transparent and accountable budget planning. In the digital era, hospitals as public service units are required to manage finances in a professional and measurable manner to support the achievement of an Unqualified Opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK). This study uses a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through documentation studies, observation of digital systems, and in-depth interviews with RSUD management. The results showed that the implementation of digital systems such as e-Planning, e-Budgeting, SIPKD, and SIMRS has significantly contributed to the efficiency of hospital financial management, accelerated the budget planning and reporting process, and improved the accountability of financial decision-making. Technology-adaptive management strategies also strengthen cross-unit coordination and data-driven internal controls. Thus, digital innovation in BLUD financial management is an important pillar in hospital governance reform and supports the creation of an accountable public finance system.

Keywords: Digitalization, BLUD, local finance, transparency, RSUD, management strategy, e-budgeting.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam strategi manajemen inovasi keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di RSUD Cempaka Putih, dalam rangka mewujudkan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dalam era digital, rumah sakit sebagai unit layanan publik dituntut untuk mengelola keuangan secara profesional dan terukur guna mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi sistem digital, dan wawancara mendalam dengan pihak manajemen RSUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti e-Planning, e-Budgeting, SIPKD, dan SIMRS telah berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan rumah sakit, mempercepat proses perencanaan dan pelaporan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan keuangan. Strategi manajemen yang adaptif terhadap teknologi juga memperkuat koordinasi lintas unit serta pengawasan internal berbasis data. Dengan demikian, inovasi



digital dalam pengelolaan keuangan BLUD menjadi pilar penting dalam reformasi tata kelola rumah sakit dan mendukung terciptanya sistem keuangan publik yang akuntabel.

Kata Kunci:

Digital Marketing; Kompetensi Kerja; Lembaga Kampus; Pelatihan Mahasiswa; Sertifikasi Digital; Soft Skill

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital dan tuntutan reformasi birokrasi, sektor pelayanan publik dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, namun tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam mendukung strategi manajemen keuangan yang inovatif, terutama dalam proses perencanaan anggaran yang selama ini kerap menghadapi tantangan administratif dan ketidakterpenuhan data.

RSUD Cempaka Putih, sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan anggarannya. Di tengah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), digitalisasi sistem keuangan di tingkat unit kerja menjadi bagian penting dari strategi reformasi menyeluruh. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan teknologi digital dalam strategi manajemen inovasi keuangan RSUD Cempaka Putih dapat mendukung terciptanya perencanaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

RSUD Cempaka Putih sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak memiliki opini WTP tersendiri karena:

1. Opini WTP Diberikan pada Tingkat Pemerintah Daerah (Entitas Pelaporan)
 - a) Opini WTP atau WDP diberikan oleh BPK hanya terhadap entitas pelaporan utama, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - b) RSUD Cempaka Putih hanya menyusun laporan keuangan unit kerja, yang kemudian dikonsolidasikan ke dalam LKPD oleh Dinas Kesehatan dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah).
2. Kontribusi RSUD Bisa Mempengaruhi Opini
 - a) Jika RSUD Cempaka Putih memiliki masalah material, seperti:
 - I. Aset tidak tercatat atau tak terverifikasi,
 - II. Pendapatan BLUD tidak tertib,
 - III. Pertanggungjawaban belanja tidak lengkap,maka hal itu bisa menjadi temuan BPK, dan bila signifikan, bisa memengaruhi opini LKPD DKI Jakarta.

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai gantinya, DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berikut adalah beberapa alasan utama yang dikemukakan BPK pada saat itu:

1. Permasalahan dalam Penatausahaan Aset Tetap
 - a) Salah satu alasan utama DKI Jakarta tidak mendapatkan WTP adalah ketidaktertiban dalam pencatatan dan pengelolaan aset tetap.
 - b) Banyak aset milik pemerintah DKI yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, tidak dicatat dengan baik, atau tidak dapat diverifikasi keberadaannya.
 - c) Nilai aset tetap yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
2. Permasalahan Hibah dan Bantuan Sosial
 - a) BPK menemukan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai prosedur, baik dari sisi verifikasi, pencatatan, maupun pelaporan.
 - b) Ada hibah yang tidak didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang memadai.
3. Pengelolaan Keuangan yang Belum Tertib



- a) BPK mencatat adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, seperti rekonsiliasi data keuangan yang belum berjalan optimal.
 - b) Transaksi keuangan tertentu tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak sesuai ketentuan akuntansi pemerintah.
4. Rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti
- a) Beberapa rekomendasi dari audit tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan aset dan pengendalian internal.
- Opini WDP artinya laporan keuangan DKI Jakarta secara umum masih wajar, namun ada beberapa pengecualian material yang membuat BPK tidak dapat memberikan opini tertinggi (WTP). Pada 2016, kendala utamanya terletak pada pengelolaan aset tetap dan transparansi bantuan sosial, yang merupakan masalah klasik di banyak daerah saat itu.
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Strategi Manajemen Inovasi Keuangan BLUD untuk Mendukung Perencanaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel.

KAJIAN LITERATUR

1. Teori Inovasi Manajemen Keuangan Publik (Public Financial Management Reform)

Teori ini menjelaskan bagaimana lembaga sektor publik mengadopsi pendekatan baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Menurut Allen dan Tommasi (2001), reformasi keuangan sektor publik mencakup: Penguatan sistem informasi keuangan, Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, Penerapan sistem audit dan kontrol yang modern.

Implikasi: BLUD seperti RSUD Cempaka Putih perlu mengadopsi inovasi keuangan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga responsif terhadap tuntutan efisiensi dan akuntabilitas publik.

2. Teori Teknologi Informasi dalam Organisasi Publik

Davis (1989) dalam Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh: Perceived Usefulness (manfaat yang dirasakan), Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan).

Dalam konteks BLUD, penerapan sistem digital seperti SIPKD, e-Budgeting, dan e-Planning diharapkan: Memudahkan perencanaan anggaran, Mempercepat proses validasi dan pelaporan, Meminimalkan kesalahan input dan manipulasi data.

3. Teori Akuntabilitas Publik

Romzek dan Dubnick (1987) mengklasifikasikan akuntabilitas publik dalam empat bentuk: Birokratik (berbasis regulasi), Profesional (berbasis keahlian), Hukum (berbasis hukum), Politik (berbasis harapan masyarakat).

Dalam BLUD, akuntabilitas menjadi krusial karena unit kerja ini mengelola dana publik tetapi memiliki fleksibilitas manajerial. Maka, sistem digital yang transparan menjadi instrumen penting untuk memenuhi semua jenis akuntabilitas tersebut.

4. Teori Good Governance

Konsep good governance menurut UNDP (1997) mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks BLUD: Transparansi dicapai melalui sistem pelaporan digital, Akuntabilitas ditingkatkan melalui jejak audit yang terotomatisasi, Efisiensi muncul melalui digitalisasi proses anggaran dan keuangan.

5. Teori Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Bodnar dan Hopwood (2013), SIA adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan BLUD: SIA membantu integrasi data dari perencanaan hingga pelaporan, Mengurangi ketergantungan pada dokumen manual, Mempermudah proses audit oleh BPK atau inspektorat.



METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber kredibel seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel keuangan daerah. Teknik analisis bersifat deduktif, yaitu menyusun argumen logis dari teori-teori Keuangan dalam era digitalisasi untuk mencapai keuangan yang akuntabel dan transparan.

Variabel utama dalam analisis ini mencakup: (1) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Strategi Manajemen Inovasi Keuangan BLUD (2) Perencanaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel.

Meskipun tidak menggunakan data kuantitatif maupun wawancara lapangan, penelitian ini tetap relevan dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan Teknologi digital dalam strategi manajemen inovasi keuangan BLUD, khususnya sebagai bagian dari transformasi pada institusi BLUD khususnya RSUD Cempaka Putih agar lebih responsif terhadap dinamika industri digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam konteks manajemen strategi, RSUD Cempaka Putih telah menjadikan digitalisasi sebagai bagian integral dari arah kebijakan jangka menengah organisasi. Strategi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan transformasi struktural yang mengubah cara rumah sakit dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan keuangannya. Implementasi sistem digital seperti e-Planning, e-Budgeting, dan SIPKD menjadi langkah nyata dalam mendorong efisiensi serta memperkuat akuntabilitas publik. Digitalisasi diadopsi bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan birokrasi atau pelaporan kepada pemerintah daerah dan BPK, tetapi juga untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data dan pengawasan kinerja keuangan secara real-time.

Strategi inovasi yang diambil manajemen RSUD Cempaka Putih juga tampak dari penyesuaian struktur kerja internal rumah sakit. Dibentuknya unit-unit kerja khusus yang mengelola sistem informasi keuangan menunjukkan adanya arah strategi baru yang menggabungkan fungsi pelayanan kesehatan dengan keunggulan teknologi informasi. Dalam proses ini, rumah sakit tidak hanya mengikuti standar BLUD dalam fleksibilitas anggaran, tetapi juga menciptakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang mendukung pengendalian anggaran lintas unit. Hasilnya adalah proses perencanaan yang lebih partisipatif dan transparan, di mana masing-masing unit pelayanan dapat menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan data historis dan proyeksi operasional yang telah dikompilasi secara digital.

Dari sisi manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi digital di RSUD Cempaka Putih secara signifikan memperbaiki proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Sebelum adanya digitalisasi, pengajuan dan penyesuaian anggaran memerlukan waktu yang panjang, rawan kesalahan administratif, dan kurang terdokumentasi dengan baik. Namun, dengan sistem digital yang terintegrasi, rumah sakit kini mampu menyusun anggaran secara lebih akurat, mengurangi kesalahan entri, serta mempercepat proses validasi dan pengesahan. Proses pelaporan keuangan pun menjadi lebih transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagaimana disyaratkan dalam pengelolaan BLUD.



Tidak hanya dalam perencanaan, sistem digital juga memperbaiki manajemen pendapatan dan belanja rumah sakit. Pendapatan yang bersumber dari layanan BPJS maupun non-BPJS tercatat secara sistematis dan dapat dimonitor secara berkala, sehingga pengambilan keputusan terkait belanja operasional dan investasi menjadi lebih terarah. Belanja rumah sakit dapat dikendalikan melalui pemantauan langsung terhadap realisasi anggaran dan efektivitas distribusi belanja berdasarkan kebutuhan unit pelayanan. Keberadaan sistem pelaporan elektronik ini juga memperkuat kesiapan rumah sakit dalam menghadapi audit, baik oleh internal auditor, inspektorat, maupun BPK.

Secara umum, penerapan digitalisasi dalam manajemen inovasi keuangan RSUD Cempaka Putih terbukti memberikan kontribusi besar dalam menciptakan perencanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pada efisiensi layanan publik dan tata kelola keuangan yang baik. RSUD Cempaka Putih tidak hanya memperkuat posisinya sebagai institusi BLUD yang profesional, tetapi juga turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pembahasan

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik telah menjadi arus utama dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, termasuk pada unit pelayanan seperti RSUD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). RSUD Cempaka Putih sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi sistem keuangan berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari strategi manajerial yang terintegrasi. Pembahasan ini menguraikan bagaimana pemanfaatan teknologi digital diimplementasikan secara strategis dan berkontribusi terhadap penguatan manajemen keuangan rumah sakit.

Dari sisi manajemen strategi, rumah sakit tidak sekadar menerapkan sistem digital sebagai respons terhadap kewajiban regulatif, melainkan menjadikannya sebagai elemen inti dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi institusi. Ini tercermin dari penggunaan sistem e-Planning untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kebutuhan nyata layanan, serta e-Budgeting yang mengintegrasikan kebutuhan tersebut ke dalam kerangka anggaran secara efisien dan transparan. Pendekatan strategis ini menunjukkan adanya kesadaran manajemen akan pentingnya data yang terukur dan terverifikasi sebagai dasar perumusan kebijakan keuangan yang efektif. Keputusan-keputusan anggaran tidak lagi semata-mata berdasarkan estimasi atau pendekatan top-down, tetapi telah berbasis analisis digital yang memungkinkan keterlibatan lintas unit dan penguatan koordinasi internal.

Lebih jauh, strategi penguatan sistem pelaporan digital seperti SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) juga menunjukkan orientasi manajemen pada integrasi lintas sistem. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih data dan mendukung efisiensi pengawasan. Dalam konteks audit dan pengendalian, sistem ini memberikan audit trail yang dapat dilacak secara elektronik, sehingga memperkuat kredibilitas rumah sakit dalam pertanggungjawaban publik, terutama saat BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan.

Dari perspektif manajemen keuangan, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap bagaimana RSUD Cempaka Putih menyusun, mengelola, dan melaporkan anggarannya. Perencanaan anggaran menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis kebutuhan layanan yang aktual. Ini sejalan dengan prinsip BLUD yang menekankan efisiensi anggaran dalam rangka peningkatan mutu layanan publik. Proses penganggaran yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan rawan kesalahan kini dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan karena setiap prosesnya terekam secara digital, mulai dari input hingga validasi oleh pengelola keuangan.



Selain itu, digitalisasi juga memudahkan dalam memantau realisasi belanja dan pendapatan rumah sakit. Sistem memungkinkan identifikasi cepat atas potensi deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, serta memudahkan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini menjadi nilai tambah dalam proses audit dan sangat berkontribusi pada upaya DKI Jakarta dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dalam hal ini, RSUD Cempaka Putih sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) turut berperan dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah melalui penyampaian laporan BLUD yang akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi digital di RSUD Cempaka Putih terbukti mendukung dua aspek utama tata kelola keuangan publik, yakni transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi bukan hanya mempercepat proses teknis administrasi, tetapi juga memperbaiki cara rumah sakit memandang perencanaan dan pengelolaan keuangannya sebagai bagian dari misi pelayanan publik yang lebih besar. Pembahasan ini mengkonfirmasi bahwa strategi manajemen berbasis inovasi digital dapat menjadi model reformasi keuangan daerah, khususnya dalam unit layanan publik berbasis BLUD, dan memberi dampak positif dalam mendukung capaian opini WTP secara sistemik di tingkat pemerintah daerah. Jika dilihat dari laporan Survey Kepuasan pada RSUD Cempaka Putih terhadap unsur pelayanan yang di nilai setiap tahun, yaitu penilaian Sistem dan prosedur yang ada pada RSUD Cempaka Putih, peningkatan nilai kepuasan pada indikator Sistem dan Prosedur dengan Indikator penilaian yaitu Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, Laporan keuangan tersedia otomatis setiap akhir bulan, dan estimasi biaya layanan tersedia sebelum tindakan dilakukan. Dari unsur – unsur tersebut, jika di lihat dari tren positif yang ada pada laporan survey kepuasan RSUD Cempaka Putih tahun 2020 – 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada unsur pelayanan yang di nilai, yaitu Sistem dan Prosedur.

Tabel 1: nilai Survey Kepuasan RSUD Cempaka Putih Tahun 2020 – 2024.

| UNSUR PELAYANAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SISTEM DAN PROSEDUR | 87,65 | 89,06 | 90,47 | 95,68 | 99,96 |
| PERSYARATAN PELAYANAN | 90,9 | 89,61 | 86,33 | 95,68 | 99,92 |
| KOMPETENSI PEGAWAI | 88,87 | 84,74 | 86,13 | 95,27 | 94,85 |
| SARANA DAN PRASARANA | 83,38 | 86,33 | 81,21 | 80,91 | 96,71 |

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa nilai survey kepuasan pada unsur pelayanan Sistem dan Prosedur mengalami peningkatan di setiap tahun nya, hal tersebut merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan RSUD Cempaka Putih

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan RSUD Cempaka Putih, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya perencanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi sistem e-Planning, e-Budgeting, SIPKD, dan SIMRS tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memperbaiki kualitas data, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan dan belanja rumah sakit.

Dari sisi manajerial, digitalisasi telah mendorong lahirnya strategi baru dalam pengelolaan BLUD yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan terbuka terhadap evaluasi. RSUD



Cempaka Putih menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan digital dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan daya respons kebijakan keuangan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu, digitalisasi juga mendukung terciptanya sistem pelaporan yang sesuai dengan standar pemeriksaan BPK, sehingga berkontribusi terhadap capaian opini WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen inovasi keuangan BLUD tidak hanya menjadi sarana pendukung administratif, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi kelembagaan menuju tata kelola keuangan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas SDM Digital

Agar digitalisasi keuangan berjalan optimal, rumah sakit perlu melakukan pelatihan berkala bagi seluruh staf terkait, khususnya di bidang perencanaan, keuangan, dan teknologi informasi. Kompetensi teknis yang baik akan mengurangi risiko kesalahan input dan meningkatkan efektivitas penggunaan sistem.

2. Integrasi Lintas Sistem yang Lebih Komprehensif

Disarankan agar sistem informasi rumah sakit terintegrasi secara penuh dengan sistem keuangan daerah (SIPKD) dan sistem pelaporan nasional, agar proses pertanggungjawaban keuangan lebih efisien dan terhindar dari redundansi data.

3. Evaluasi Berkala terhadap Efektivitas Sistem Digital

RSUD Cempaka Putih perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem digital yang digunakan, termasuk dari aspek keamanan data, responsif sistem, serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan manajemen keuangan BLUD.

4. Replikasi Praktik Baik ke RSUD Lain di DKI Jakarta

Keberhasilan digitalisasi keuangan di RSUD Cempaka Putih dapat dijadikan contoh bagi rumah sakit lain di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Replikasi ini akan memperkuat akuntabilitas laporan keuangan di tingkat daerah dan mendukung konsistensi capaian opini WTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019. Jakarta: BPK RI. Retrieved from <https://www.bpk.go.id>
- Budianto, A. (2021). Penerapan E-Budgeting dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jb8t9>
- Firmansyah, D. (2022). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Rumah Sakit: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(2), 134–146.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Jakarta: Kemendagri. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kurniawan, D., & Siregar, T. (2020). Pengaruh Digitalisasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 100–112. <https://doi.org/10.14710/jap.v5i2.1234>
- Nurul, H., & Ramadhani, I. (2021). E-Planning dan E-Budgeting Sebagai Inovasi Tata Kelola Keuangan Publik yang Transparan. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(3), 85–96.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.

RSUD Cempaka Putih. (2023). Laporan Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022. Jakarta: RSUD Cempaka Putih.

RSUD Cempaka Putih (2024). Laporan Survey Kepuasan Tahun 2024. Jakarta: RSUD Cempaka Putih

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.

Susanto, A., & Haryanto, T. (2020). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di BLUD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 71– 84.